

A. Latar Belakang Pada setiap entitas baik bisnis maupun pemerintah, aset tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasi entitas. Aset tetap merupakan salah satu dari komponen aset yang paling dominan didalam struktur laporan posisi keuangan. Aset tetap merupakan aset yang dimiliki oleh entitas guna menunjang kelancaran kegiatan entitas untuk mencapai tujuannya. Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan serta aset lainnya. Peran aset tetap sangat besar bagi entitas. Dilihat dari fungsinya, aset tetap seperti bangunan sangat mendukung kegiatan operasional kantor dan kegiatan lainnya, mesin sebagai alat produksi maupun sebagai fasilitas pelayanan yang diberikan oleh entitas. Aset tetap mempunyai sifat yang relatif permanen, perolehan aset tetap dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli tunai, membeli secara kredit, melalui pertukaran, hibah atau sumbangan, sewa beli ataupun cara-cara lain. Pada entitas pemerintah, aset tetap merupakan salah satu hal yang sangat krusial serta rentan akan masalah. Oleh karena itu, Informasi keuangan tentang aset tetap adalah informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan untuk mengetahui sejauh mana entitas telah melakukan investasi atas dana dan pinjaman yang diperoleh dari investor dan kreditur. Bahkan pada entitas pemerintah informasi tentang aset tetap penting untuk diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang telah diberi amanat untuk mengelola dana yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

2 Untuk menyajikan informasi keuangan yang baik berupa laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan, maka diperlukan suatu standar pelaporan yang dapat dipahami sama antara pengguna laporan keuangan dengan penyusun laporan keuangan, standar tersebut disebut standar akuntansi. Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan diluar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Menurut Sinaga (2008:13) “standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku umum”. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Jika pada entitas bisnis penyusunan laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maka pada entitas publik mengacu pada standar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sejak era reformasi ada dua SAP yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni SAP yang diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 2015 kemudian direvisi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi yang mengatur akuntansi aset tetap di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07. Di dalam PSAP Nomor 07 tersebut diatur tentang Klasifikasi Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penghentian dan 3 Pelepasan Aset Tetap serta Pengungkapan Aset Tetap. Klasifikasi yang digunakan dalam PSAP 07 adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Aset tetap

dalam PSAP Nomor 07 dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap pada entitas publik, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria yang diatur dalam PSAP Nomor 07. PSAP Nomor 07 selain digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan terkait aset tetap, juga menjadi acuan bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan. Auditor didalam entitas bisnis adalah akuntan publik sedangkan pada entitas pemerintahan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan suatu lembaga negara independen yang berwenang memeriksa keuangan negara termasuk di dalamnya keuangan daerah. Banyak daerah yang memperoleh pendapat atau opini disclaimer oleh BPK diantaranya disebabkan oleh pengelolaan asetnya kurang baik. Yusuf (2010:4) juga mengatakan bahwa “disclaimer dapat terjadi karena secara material, penyajian laporan keuangan dilakukan tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”. Pemerintah Daerah yang memperoleh pendapat disclaimer di antaranya adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2013 4 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 memperoleh pendapat disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Untuk lebih jelas, peneliti menyajikan salah satu LKPD Kepulauan Selayar yakni Laporan Posisi Keuangan sisi debit sebagaimana tampak pada tabel 1 sebagai berikut: Tabel 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2013 URAIAN Tahun 2013 (Audited), (Rp) % ASET ASET LANCAR 6.445.633.488,17 3,59% INVESTASI JANGKA PANJANG 55.285.192.191,50 2,99% ASET TETAP Tanah 176.885.463.841,00 10,25% Peralatan dan Mesin 161.123.130.490,18 9,34% Gedung dan Bangunan 302.504.628.719,50 17,53% Jalan, Irigasi dan Jaringan 968.350.414.358,00 56,11% Aset Tetap Lainnya 12.069.189.651,00 0,70% Konstruksi dalam pengerjaan 104.873.939.801,00 6,08% Jumlah Aset Tetap 1.725.806.766.860,68 93,34% DANA CADANGAN - ASET LAINNYA 1.406.040.600,00 0,08% JUMLAH ASET 1.848.943.633.140,35 100% Sumber : DPPKAD Kep. Selayar (data diolah) Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Rp1.725.806.766.860,86. Dari aset tetap tersebut, BPK menemukan beberapa temuan-temuan yang menjadi salah satu dasar pemberian penilaian “Tidak Memberikan Pendapat” terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Temuan-temuan tersebut di antaranya adalah:

- 5 1. Aset tetap tanah yang berjumlah Rp176.885.463.841,00 BPK menemukan Rp93.096.402.351,00 (52,63%) belum memiliki sertifikat, Rp4.306.900.000,00 (2,43%) bersertifikat bukan atas nama pemerintah daerah, dan Rp4.378.173.188,00 (2,48%) tidak diketahui keberadaannya.
2. Aset tetap Peralatan dan Mesin yang berjumlah Rp161.123.130.490,00 BPK menemukan Rp3.390.309.000,00 (2,1%) dalam kondisi rusak berat dan tidak dimanfaatkan namun masih disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, aset tetap kendaraan bermotor sebesar Rp207.788.000,00 (0,13%) dicatat ganda dengan nilai berbeda dalam Laporan Posisi Keuangan. Di dalam PSAP Nomor 07 paragraf 20 dinyatakan bahwa pengakuan

aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pada paragraf 21 juga dikatakan bahwa saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Hal ini menjelaskan bahwa aset tetap yang dapat diakui hanyalah aset tetap yang memiliki dokumen kepemilikan. Berdasarkan hal tersebut aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak memiliki sertifikat tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah dan tidak dapat disajikan Laporan Posisi Keuangan. Di dalam PSAP Nomor 07 juga di atur bahwa aset tetap dalam kondisi rusak berat harus dihapus dan dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan. Dari tabel 1 di atas kita juga dapat melihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memberlakukan penyusutan atas aset tetap 6 yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam PSAP Nomor 07 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Temuan-temuan BPK tersebut di atas serta belum diterapkannya penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbulkan dugaan adanya kekurangan sesuaian penyusunan Laporan Keuangan terkait aset tetap di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Mengingat pentingnya penerapan PSAP Nomor 07 dalam mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap pada laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Penelitian ini diberi judul “Penerapan PSAP Nomor 07 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah calon peneliti jelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 7 D. Manfaat Hasil Penelitian a. Bagi peneliti Diharapkan melalui penelitian ini peneliti dapat lebih memahami mengenai PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. b. Bagi Pemerintah Daerah Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Disamping itu, peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terutama Akuntansi Aset Tetap di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih baik dari sebelumnya. c. Bagi Pihak Lain Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, serta diharapkan dapat membantu pengembangan Akuntansi Sektor Publik.